

Analisis Kebijakan Pada Kebutuhan Transportasi Laut Di Pelabuhan Batu-Guluk Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Anis Sulala¹⁾, Ulul Albab²⁾, Ika Devy Pramudiana³⁾

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Corresponding Author: anissulala231099@gmail.com, ika.devy@unitomo.ac.id

Abstrak

Di Indonesia terdapat beberapa jenis transportasi laut. ada yang lazim digunakan untuk keperluan umum. Ada pula yang hanya dipakai untuk keperluan tertentu saja. Pelabuhan itu sendiri sebagai prasarana transportasi laut yang mendukung kelancaran transportasi laut memiliki fungsi yang erat dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Pelabuhan Batu-Guluk merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Kangean dengan Pulau Madura. Kurangnya ketertiban penumpang, misalnya kapal sudah melebihi muatan dan kapasitas tapi pihak dari petugas kapal kadang tetap saja menerima penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan pada kebutuhan transportasi laut di Pelabuhan Batu Guluk dan ini mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses kegiatan transportasi laut di Pelabuhan Batu Guluk Menurut William dunn. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data dokumen, data wawancara, data observasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif. Hasil yang didapatkan adalah: (1) Kurangnya transportasi laut dan kurangnya ketertiban penumpang transportasi laut untuk penumpang belum bisa dikatakan layak karena kapasitas penumpang yang banyak dan ukuran kapal yang kecil, hal ini sangat berbahaya dengan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Maka transportasi laut untuk penumpang yang disediakan harus ditambah lagi mengingat banyaknya jumlah penumpang yang butuh dengan cara memperbanyak kerjasama antar perusahaan perkapalan dan juga mencari sponsor untuk bisa memenuhi kurangnya transportasi laut untuk Kepulauan Kangean, (2) Faktor pendukung dalam proses kegiatan transportasi laut di pelabuhan Batu-Guluk tersedianya beberapa tenaga kerja yang digunakan seperti buruh yang membantu proses bongkar muat penumpang serta jam keberangkatan kapal yang selalu on time dan barang sedangkan factor penghambat dalam proses kegiatan transportasi laut di pelabuhan Batu-Guluk yaitu cuaca, kurangnya ketersediaan armada transportasi, dan kurangnya petugas loket dalam melayani pembelian tiket.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Transportasi, Pelabuhan Batu-Guluk

Abstract

In Indonesia there are several types of sea transportation, some of which are commonly used for public purposes. Some are only used for certain purposes. The port itself as a sea transportation infrastructure that supports smooth sea transportation has a function that is closely related to social and economic factors. Batu-Guluk Harbour is a ferry port that connects Kangean Island with Madura Island. Lack of passengers, for example the ship has exceeded its load and capacity but the ship's officers sometimes still accept passengers. This study aims to find out how to analyze the policy on sea transportation needs at Batu Guluk Port and to find out what factors support and hinder the process of sea transportation activities at Batu Guluk Port, according to William dunn. The research method chosen in this study uses a qualitative approach, the data collected is in the form of document data, data interviews, data observation, then

analyzed using interactive data analysis. The results obtained are: (1) Lack of sea transportation and passenger comfort Sea transportation for passengers cannot be said to be feasible because of the large passenger capacity and the small size of the ship, this is very dangerous with the safety and comfort of passengers. So sea transportation for passengers provided must be added considering the large number of passengers needed by increasing cooperation between shipping companies and also looking for sponsors to be able to meet the shortage of sea transportation to the Kangean Islands, (2) Supporting factors in the process of sea transportation activities at Batu port-Guluk the availability of several workforces used such as laborers who assist in the process of loading and unloading passengers and ship departure times which are always on time and goods while the inhibiting factors in the process of sea transportation activities at Batu-Guluk port are weather, lack of availability of transportation fleets, and shortage of officers counter in serving the purchase of tickets.

Keywords: Policy Analysis, Transportation, Batu-Guluk Port.

A. PENDAHULUAN

Luas wilayah Indonesia di dominasi oleh kepulauan dan dihubungkan dengan perairan yang sangat luas sehingga untuk mengembangkan dan menggerakkan Pembangunan Nasional sektor perhubungan udara dan perhubungan laut memegang peranan yang sangat penting dalam mendekatkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, suatu daerah dengan pulau terluar serta wilayah perbatasan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, sehingga dapat mengarahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Transportasi merupakan salah satu alat penunjang yang dibutuhkan oleh manusia. Transportasi sejak dulu sudah ada, mulai dari transportasi yang sederhana sampai yang canggih yang kita rasakan sampai saat ini. Dalam perekonomian yang maju, sarana transportasi yang digunakan semakin maju, yaitu dengan digunakannya kendaraan bermotor, seperti mobil, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat udara.

Adapun jenis-jenis transportasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Yang pertama Transportasi darat itu sendiri menjadi transportasi yang paling sering digunakan setiap hari oleh masyarakat luas. Tentunya berkat keberadaan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor masyarakat semakin mudah dalam melakukan aktivitas. Transportasi darat tidak hanya mencakup mobil dan motor akan tetapi ada juga kereta api, bus, sepeda, becak dan lainnya. Yang kedua transportasi udara yaitu transportasi yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan transportasi lainnya, yakni dapat menjangkau berbagai daerah dengan lebih mudah dan cepat. Alat transportasi udara mampu bergerak lebih cepat, memiliki lintasan yang luas, serta bebas hambatan. Transportasi yang mencakup udara yaitu pesawat, helikopter serta balon udara. Yang ketiga transportasi laut yaitu transportasi yang beroperasi diatas air. Alat transportasi laut meliputi kapal, perahu, rakit hingga tongkang.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis transportasi laut. Ada yang lazim digunakan untuk keperluan umum. Ada pula yang hanya dipakai untuk keperluan tertentu saja. Untuk memperlancar transportasi laut tentu harus adanya pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal. Pelabuhan itu sendiri sebagai prasarana transportasi laut yang mendukung kelancaran transportasi laut memiliki fungsi yang erat dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah Pelabuhan Batu-Guluk. Pelabuhan Batu-Guluk merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Kangean dengan Pulau Mandura dan yang lainnya. Pelabuhan Batu-Guluk mulai beroperasi sebagai pelabuhan khusus penyeberangan menjadi pasangan Pelabuhan Batu-Guluk yang ada di Pulau Kangean, untuk pergi ke pelabuhan Batu-Guluk masyarakat cukup menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit kalo yang tinggalnya jauh dari pelabuhan, dan transportasi yang bisa di gunakan adalah kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kepulauan Kangean mempunyai tiga Kecamatan, yang diantaranya adalah: Kecamatan Arjasa Kecamatan Kangayan, dan Kecamatan Sapeken. Pulau Kangean berjarak sekitar 100 km dari Sumenep. Transportasi yang ada saat ini adalah kapal laut yang dikelola PT Dharma Lautan Indonesia dan Sumekar Line (milik Pemkab Sumenep) dengan transportasi ini bisa di tempuh dalam waktu 11 sampai 12 jam dari pelabuhan Kalianget ke pelabuhan Batu Guluk Kangean. Selain dengan adanya kapal Pemda Sumenep ada juga Kapal Express dari perusahaan swasta yang hanya memerlukan waktu 3,5 s/d 4 jam untuk menempuh jarak tersebut. Dengan transportasi ini masyarakat Kangean dapat melakukan perjalanan baik urusan personal maupun urusan muat barang/dagang dari Pulau Kangean ke Sumenep maupun dari Sumenep ke Kangean. Dengan demikian kapal laut disini adalah sangat penting bagi masyarakat Kangean untuk melakukan urusannya masing-masing. Tapi seringkali juga dari pentingnya kapal laut itu tadi, kapal laut yang satu-satunya menjadi transportasi untuk menyeberangi lautan yang sebegitu lamanya sering kali tidak beroperasi, dikarenakan sering terjadi kerusakan pada mesin kapal laut. Dan dari rusaknya kapal itu akan menghambat atau menunda keperluan masing-masing masyarakat kangean untuk melakukan transaksi entah itu dari Kangean-Sumenep atau Sumenep Kangean.

Fenomena yang terjadi tentang kebijakan transportasi laut terhadap masyarakat Kepulauan Kangean adalah kurangnya ketertiban penumpang, misalnya kapal sudah melebihi muatan dan kapasitas tapi pihak dari petugas kapal kadang tetap saja menerima penumpang. Hal ini yang menyebabkan para penumpang merasa kurang nyaman dalam perjalanan rute Kangean-Kalianget. Padahal dalam hal transportasi yang berfungsi untuk memindahkan barang dan penumpang harus menjadi hal utama dalam kenyamanan

penumpang. Dari kejadian yang terus menerus sering terjadi dalam hal transportasi terlihat jelas bahwa kurangnya kebijakan terhadap transportasi laut Kangean-Kalianget ini.

Transportasi yang dioperasikan hanya 2 kapal saja, dan setiap kali beroperasi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembelian tiket kerap kali habis dari banyaknya masyarakat atau warga kangean yang berkepentingan diluar kangean itu sendiri. Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah, sama seperti Penduduk Pulau Kangean berjumlah 78.468 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 173,11 orang per km, angka ketergantungan 93,66%, dan jumlah rumah tangga sebanyak 22.300 buah. Hal ini tentu saja akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya, mobilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun mobilitas disini lebih ditekankan pada mobilitas yang dimaksudkan adalah pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001. Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan, Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Angkutan laut masih memegang peranan penting. Daya angkut kapal yang sangat besar, sehingga dapat menekan biaya satuan, merupakan daya tarik tersendiri bagi dunia perdagangan, apalagi memang sering kali tidak ada alternatif lain terkecuali menggunakan kapal, karena angkutan melalui air (laut) lambat sehingga sesuai untuk mengangkut barang agar tidak rusak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat disadari pentingnya transportasi laut bagi warga Kangean khususnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS KEBIJAKAN PADA KEBUTUHAN TRANSPORTASI LAUT PELABUHAN BATU-GULUK KEPULAUAN KANGEAN KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP”**. Karena cukup disayangkan Kepulauan Kangean selalu ketinggalan jauh dari induknya yaitu Sumenep tentang sebuah kelayakan yang harus setara dengan masyarakat Kepulauan Kangean.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebijakan pada kebutuhan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk?
3. Rekomendasi apa yang membantu proses kegiatan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk?

B. METODE

1. Pengertian Analisis Kebijakan

Kebijakan publik memiliki hubungan keterkaitan yang erat dengan berbagai hal di kehidupan masyarakat yang suatu ketika dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang ada. Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yaitu sudut pandang (point of view), serangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan (regulations). William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai cara metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah – masalah kebijakan.

(Wiaro 2005:27), mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu – isu teknik sosial yang

mebawakan solusi – solusi yang lebih baik. Dari pengertian analisis kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai cara alternatif program serta kinerja kebijakan.

2. Teori Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya (William N. Dunn, 2000). Analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan pemaduan berbagai informasi termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras. Kegiatan utama analisis kebijakan adalah pengeumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan yang logis dari informasi tersebut. Salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan adalah hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengelolaan lebih lanjut dari hasil penelitian yang didapatkan sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dari kebijakan publik. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan berhati-hati yang melibatkan penelitian terhadap isu-isu atau masalah publik.

3. Prosedur Analisis Kebijakan

Prosedur analisis kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan (Ackoff dalam dunn, 2000:121). Dunn (2000-21) berpendapat bahwa metodeologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim digunakan dalam memecahkan masalah manusia. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni:

a) Perumusan Masalah

Perumusan masalah ialah informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik (Dunn, 1999). Langkah awal dalam perumusan masalah ialah mengenai situasi atau mengenai masalah. Dari situasi masalah kemudian dikembangkan dengan proses pencarian masalah yang lebih detail dan akurat yang kemudian membentuk sebuah meta masalah.

b) Peramalan

Dalam menganalisis kebijakan, untuk memformulasikan sebuah kebijakan baru maka diperlakukan adanya peramalan atau prediksi mengenai kebijakan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Peramalan kebijakan (policy forecasting) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan (Dunn, 2000:291).

c) Rekomendasi

Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan perlu adanya informasi tentang konsekuensi di masa yang akan datang setelah dilakukan berbagai alternatif tindakan. Prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah ialah deskripsi, prediksi, evaluasi, dan preskripsi.

d) Pemantauan

Pemantauan merupakan proses analisis publik yang menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemantauan menghasilkan pernyataan yang bersifat program diadopsi lalu diimplementasikan sebelum tindakan dilakukan. Informasi yang dihasilkan pemantauan setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu ketundukan, pemeriksaan, akuntansi dan eksplanasi.

e) Penilaian

Penilaian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses analisis kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, tujuan, nilai dan kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi juga memberikan sumbangan kalifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

4. Pengertian Transportasi

Menurut Miro (2005) secara umum transportasi adalah sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu. Karena dalam pengertian di atas terdapat kata – kata usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Menurut Jinca (2011) sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi wilayah yang tersebar dari Hinterland, dihubungkan oleh jaringan transportasi jalan ke pelabuhan, sistem transportasi laut (ke pelabuhan, pelayaran/perkapalan, dan potensi pergerakan barang) mempunyai peranan sangat penting. Pelabuhan sebagai titik – titik simpul jasa distribusi melalui laut dan sebagai pusat kegiatan transportasi laut, menyediakan ruang untuk industri dan menunjang pembangunan masa depan. Moda transportasi laut merupakan pilihan untuk mengangkut penumpang ataupun barang dalam jumlah besar, kecepatan, dan biaya angkutan per ton mil, relatif rendah, dan sangat menguntungkan untuk proses pengangkutan barang maupun penumpang dalam jarak tempuh yang jauh terkhususnya pada wilayah kepulauan. Kepulauan, Indonesia mempunyai potensi wilayah yang tersebar dari Hinterland, dihubungkan oleh jaringan transportasi jalan ke pelabuhan, sistem transportasi laut (ke pelabuhan, pelayaran/perkapalan, dan potensi pergerakan barang) mempunyai peranan sangat penting.

Pelabuhan sebagai titik – titik simpul jasa distribusi melalui laut dan sebagai pusat kegiatan transportasi laut, menyediakan ruang untuk industri dan menunjang pembangunan masa depan. Moda transportasi laut merupakan pilihan untuk mengangkut penumpang ataupun barang dalam jumlah besar, kecepatan, dan biaya angkutan per ton mil, relatif rendah, dan sangat menguntungkan untuk proses pengangkutan barang maupun penumpang dalam jarak tempuh yang jauh terkhususnya pada wilayah kepulauan. Sesuai dengan keputusan

Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut yang menyebutkan bahwa Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam suatu perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Berdasarkan penjelasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transportasi laut merupakan suatu kegiatan atau proses pengangkutan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan jarak dekat maupun jauh melalui jalur laut menggunakan sarana angkutan kapal laut, serta fasilitas pelabuhan difungsikan sebagai titik – titik jasa distribusi dan sebagai pusat kegiatan transportasi laut. Transportasi atau transport diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari satu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ketempat tujuan. Tempat asal dapat merupakan daerah produksi, dan tempat tujuan adalah daerah

konsumen (atau pasar). Tempat tempat asal dapat pula merupakan daerah perumahan (permukiman), sedangkan tempat tujuannya adalah tempat bekerja, kantor, sekolah, kampus, rumahsakit, pasar, took, pusat perbelanjaan, hotel, pelabuhan, Bandar udara, dan masih banyak sekali yang lainnya, ataupun dalam arah sebaliknya, yaitu tempat tujuan merupakan tempat asal dan tempat asal merupakan tempat tujuan (Adisasmita, 2011).

5. Peran dan Manfaat Transportasi

Peranan transportasi dalam kehidupan manusia, perekonomian dan pembangunan semakin penting, dicerminkan oleh digunakannya sarana angkutan modern yang berkecepatan tinggi dan berkapasitas muat besar. Transportasi mempunyai peranan penting dan semakin bertambah penting, sejak zaman primitif sampai zaman modern sekarang ini, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa transportasi itu setua peradaban manusia, setua dengan keberadaan manusia di dunia. Transportasi merupakan derived demand dan mempunyai ciri tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga tidak bias dipenggal atas dasar suatu wilayah administrasi tertentu. Untuk itu dalam memandang suatu wilayah, transportasi menempatkan wilayah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, atau suatu model untuk mempelajari dunia nyata.

Transportasi menciptakan guna tempat dan guna waktu. Guna yang diciptakan jasa transportasi merupakan manfaat dalam bidang ekonomi, social dan politik/strategis. Manfaat jasa transportasi dirasakan dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkupnya sangat luas, bersifat multi sektoral, dan multi disiplin. Bersifat multi sektoral berarti sektor transportasi terkait dengan sektor-sektor lain, yang ditunjukkan bahwa fungsi transportasi adalah menunjang pengembangan kegiatan sektor-sektor lain (seperti sektor perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi, dan lainnya). Bersifat multi disiplin, artinya disiplin transportasi terkait dengan disiplin-disiplin lain (misalnya disiplin pengembangan wilayah, disiplin pembangunan pedesaan, pembangunan perkotaan, dan lainnya).

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Manfaat transportasi (pengangkutan) bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkutan paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan yang beraneka.

6. Pelabuhan

Menurut keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Secara komprehensif, peran pelabuhan tidak hanya dari eksistensinya dan perkembangan pada masa depan. Tetapi sangat terkait dengan aspek perencanaan dan manajemen dalam menunjang pembangunan regional, antara daerah/pulau/ pelabuhan, di mana terjadi interaksi antar sumberdaya pembangunan, seperti: penduduk, SDA (sektoral), modal, teknologi, dan sumberdaya pembangunan lainnya.

C. HASIL

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Pada Kebutuhan Transportasi Laut Di Pelabuhan Batu-Guluk Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Analisis kebijakan pada kebutuhan Transporatsi Laut di Pelabuhan Batu Guluk berdasarkan teori menurut William Dunn.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berpusat di Pelabuhan Batu-Guluk Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan menggunakan interaktif (Miles Hurbeman, A., M., dan Saldana, J., 2014:14), yang terdiri dari empat kegiatan alur yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. DISKUSI

1. Deskripsi Pulau Kangean

Kepulauan Kangean adalah gugusan pulau yang merupakan bagian paling timur Pulau Madura, Laut Jawa. Kepulauan ini terdiri dari 60 pulau, dengan luas wilayah 487 km². Pulau-pulau terbesar adalah Pulau Kangean (188 km²), Pulau Paliat, dan Pulau Sepanjang. Secara administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Penduduk pulau kangean berjumlah 78.468 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 173,11 orang per km, angka ketergantungan 93,66% dan jumlah rumah tangga sebanyak 22.300 buah.

Kepulauan Kangean merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep. Di kepulauan Kangean terdapat tiga kecamatan, yaitu Arjasa, Sapeken, dan kecamatan Kangayan. Kangayan merupakan hasil pemekaran Kecamatan Arjasa pada tahun 2009. Kecamatan Arjasa membawahi pulau Kangean bagian barat, terdiri dari Kalisangka, Buddhi, Laokjangjang, Duko, Bilis-Bilis, Sumbenangka, Arjasa, Kalikatak, Angon-Angon, Kalinganyar, Sambakati, Paseraman, Pandeman, Sawahsumur, Pagellaman, Pajennangger, Kecamatan Kangayan membawahi Pulau Kangean bagian timur yakni desa Pabian, Daandung, Air Kokap, Bantelan, Jukong-Jukong, Torjek, Kayu Waru, Batuputih, dan Paliat. Adapun untuk kecamatan Sapeken membawahi pulau-pulau kecil dan mendominasi bagian timur Kepulauan Kangean, di antaranya Sapeken, Paliat, Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Saebus, Sepangkur Besar, Sepangkur Kecil, Saseel, Sakala, Sepanjang dan lain-lain. Walaupun Kepulauan Kangean masuk dalam administratif Sumenep namun Kepulauan ini secara sosial ekonomi jauh tertinggal dari induknya yaitu Sumenep. Hal ini tercermin dari fasilitas umum yang tersedia, seperti Jalan, Pasar, Air bersih, Penerangan dan Sarana pendidikan. Kangean berjarak sekitar 100 km dari Sumenep. Transportasi yang ada saat ini adalah kapal laut yang dikelola PT Dharma Lautan Indonesia dan Sumekar Line (milik Pemkab Sumenep) dengan transportasi ini bisa di tempuh dalam waktu 11 sampai 12 jam dari pelabuhan Kalianget ke pelabuhan Batu Gulok Kangean.

2. Pelabuhan Batu-Guluk

Pelabuhan Batu-Guluk merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Kangean dengan Pulau Mandura dan yang lainnya. Pelabuhan Batu-Guluk mulai beroperasi sebagai pelabuhan khusus penyeberangan menjadi pasangan Pelabuhan Batu-guluk yang ada di pulau kangean , untuk pergi ke pelabuhan Batu-Guluk masyarakat cukup menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit kalo yang tinggalnya jauh dari pelabuhan , dan transportasi yang bisa di gunakan adalah kendaraan roda dua maupun roda empat. Sejarah terbentuknya pelabuhan batu-guluk ini menjadi sarana transportasi antar pulau dengan tujuan penyebrangan kesuatu tempat.

Pelabuhan Batu-Guluk merupakan salah satu pelabuhan tertua di kepulauan Kangean yang masih ada sampai sekarang. Pelabuhan ini sudah sejak dahulu, pelabuhan dibangun dengan menggunakan besi dan kayu. Pelabuhan ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat sandar kapal-kapal untuk berdagang dan juga bepergian ke suatu tempat. Pelabuhan ini sudah tidak di perhatikan lagi dengan baik sehingga mulai rusak dan hanya digunakan masyarakat Kangean sebagai sarana transportasi untuk berdagang dan bepergian ke suatu pulau terlebih ke Pulau Madura.

3. Dampak Pelabuhan Batu-Guluk Bagi Masyarakat

Pelabuhan Batu-Guluk merupakan satu satunya pelabuhan di Kepulauan Kangean Kalianget yang membawa pengaruh yang sangat besar, dalam bidang perekonomian di kepulauan Kangean Kalianget. Maka karna itu pelabuhan Batu Guluk telah membawa dampak bagi masyarakat yaitu dengan secara langsung yaitu mempermudah masyarakat dengan tujuan penyebrangan antar pulau dengan lebih mudah, selain itu juga menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar pelabuhan Batu-Guluk sebagai kurir di pelabuhan atau buruh pelabuhan Batu-Guluk. Dapat kita ketahui bahwa, Pelabuhan Batu-Guluk merupakan pelabuhan satu-satunya yang mempunyai peran sangat penting. Menurut Wardana (2001), aktifitas pembangunan akan menimbulkan dampak baik pada manusia maupun lingkungan hidup. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia sedangkan dampak bagi lingkungan hidup yaitu meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia.

4. Analisis Kebijakan Transportasi Laut Di Pelabuhan Batu-Guluk

Dari hasil temuan penelitian serta permasalahan yang ada di lapangan, baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi, ataupun observasi, dari hasil ini akan ditindak lanjuti dengan pembahasan. Peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara serta pembahasan mengenai bagaimana kurangnya ketertiban penumpang transportasi laut di pelabuhan Batu Guluk rute Kangean Kalianget Kabupaten Sumenep, yang mana dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian, adalah: Bagaimana analisis kebijakn pada kebutuhan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk Kabupaten Sumenep. Analisis dilakukan di Pelabuhan Batu-Guluk yang melayani rute Kangean-Kalianget ini dengan menghubungkan teori yang digunakan dalam analisis kebijakan transportasi laut. Berbagai keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan informan terkait dapat memberikan gambaran tentang proses transportasi laut di Pelabuhan Batu Guluk.

Berikut akan dibahas mengenai Implementasi Kebijakan transportasi laut, Mekanisme pelayanan transportasi laut, Keterlibatan Stakeholder pelabuhan dalam perencanaan dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses kegiatan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk.

a. Perumusan Masalah

Pada bagian ini akan membahas tentang analisis dari hasil penelitian di Pelabuhan Batu-Guluk ditinjau dari analisis kebijakan ialah pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi, bertujuan untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab masalah pada kebijakan yang diimplementasikan. Untuk mengatasi kemiskinan salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, dan distribusi hasilnya perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur

yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan adalah sarana dan prasarana transportasi laut. Penyediaan transportasi laut sangat diperlukan untuk menghubungkan suatu daerah tertinggal atau miskin dengan daerah yang lebih maju. Dengan adanya keterhubungan antara daerah maju dengan daerah miskin atau terisolir diharapkan taraf hidup masyarakat dapat meningkat dan kemiskinan dapat berkurang. Dari hasil temuan penelitian serta permasalahan yang ada di lapangan, baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi, ataupun observasi, dari hasil ini akan ditindak lanjuti dengan pembahasan. Peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara serta pembahasan mengenai bagaimana kurangnya ketertiban penumpang transportasi laut di pelabuhan Batu Guluk rute Kangean Kalianget Kabupaten Sumenep, yang mana dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian, adalah: Bagaimana analisis kebijakn pada kebutuhan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk Kabupaten Sumenep.

Perumusan masalah ialah informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat di identifikasikan untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik (Dunn, 1999). Langkah awal dalam perumusan masalah ialah mengenai situasi atau mengenai masalah. Dari situasi masalah kemudian dikembangkan dengan proses pencarian masalah yang lebih detil dan akurat yang kemudian membentuk sebuah meta masalah. Meta masalah adalah masalah diatas masalah atau tumpukan masalah yang belum terstruktur. Meta masalah ini dilakukan identifikasi dan pengklarifikasian masalah sehingga menghasilkan masalah substantif. Meskipun bantuan kapal yang diberikan telah di tetapkan jumlah dan mekanismenya, namun terkadang masih terjadinya keterlambatan kapal yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan transportasi laut ini. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam proses kegiatan transporatsi laut di Pelabuhan Batu-Guluk ialah mekanisme penyediaan kapal yang tidak menyesuaikan atau masih kurang dengan kebutuhan atau umlah penumpang yang ada. Sehingga ketidaktepatan waktu dalam pelayanan oleh petugas-petugas pelabuhan serta kapal terhadap para penumpang yang ingin bepergian dan ini menyulitkan atau merugikan masyarakat. Penyediaan kapal yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional non personalia pelabuhan Batu-Guluk tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan Masyarakat serta pengembangan mutu kualitas hidup manusia.

b. Peramalan

Jika peramalan kebijakan dapat dilakukan dengan baik maka anakan diperoleh visi yang sangat baik, sehingga dapat memperluas kapasitas untuk memahami, mengontrol dan membimbing masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Dalam menganalisis kebijakan, untuk memformulasikan sebuah kebijakan baru maka diperlakukan adanya peramalan atau prediksi mengenai kebijakan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Permalan kebijakan (policy forecasting) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan (Dunn, 2000:291). Penyelenggara Jasa Angkutan Penumpang, adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan layanan jasa angkutan penumpang dengan menggunakan kapal; Jaringan Perintis, adalah trayek angkutan laut yang menghubungkan daerah terpencil, daerah yang belum berkembang dan atau daerah perbatasan dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai akumulasi dan distribusi;

Menurut PP N0. 63 Tahun 1992, Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prsarana dan sarana angkutan umum baik transportasi darat, laut maupun udara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menjelaskan bahwa bantuan kapal yang diberikan telah di tetapkan jumlah dan mekanismenya, namun terkadang masih terjadinya keterlambatan kapal yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan transportasi laut ini. Maka dari itu disimpulkan bahwa hambatan dalam proses kegiatan transporatsi laut di Pelabuhan Batu-Guluk ialah mekanisme penyediaan kapal yang tidak menyesuaikan atau masih kurang dengan kebutuhan atau jumlah

penumpang yang ada. Sehingga ketidaktepatan waktu dalam pelayanan oleh petugas-petugas pelabuhan serta kapal terhadap para penumpang yang ingin bepergian dan ini menyulitkan atau merugikan masyarakat. Jadi, harus adanya penambahan kapal yang dimana bisa membedakan kapal untuk penumpang dan barang.

c. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk yang Penulis peroleh dari hasil wawancara dengan penumpang. Rekomendasi tersebut diharapkan pihak pelabuhan atau Pemerintah dapat menyediakan tambahan 1 atau 2 kapal yang disediakan untuk pengangkutan barang dan untuk cara penjualan tiketnya perlu di terapkan aturannya lagi sehingga tidak ada penjualana tiket diluar loket serta pengawasan petugas terdapat penumpang. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan perlu adanya informasi tentang konsekuensi di masa yang akan datang setelah dilakukan berbagai alternatif tindakan. Prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah ialah deskripsi, prediksi, evaluasi, dan preskripsi. Kebiasaan naik dan turun kendaraan di Pelabuhan Batu-Guluk ini terjadinya karena adanya kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga menjadi sebuah kebudayaan baru yang disebabkan karena adanya perubahan sosial di dalam struktur kehidupan masyarakat. Kebiasaan ini menjadi sebuah wujud dari kebudayaan yang disebut dengan sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. rekomendasi memungkinkan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan perlu adanya informasi tentang konsekuensi di masa yang akan datang setelah dilakukan berbagai alternatif tindakan William Dunn (2000).

d. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses analisis publik yang menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemantauan menghasilkan pernyataan yang bersifat program diadopsi lalu diimplementasikan sebelum tindakan dilakukan. Informasi yang dihasilkan pamantauan setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu ketundukan, pemeriksaan, akuntansi dan eksplanasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, petugas mengatakan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pengoperasian transportasi laut sehingga berjalan dengan baik, serta memastikan koordinasi antara instansi termasuk pihak pelabuhan dengan masyarakat agar peroperasian transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk berjalan lancar.

Bapak Matrawi menjelaskan kementerian perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait telah berkomitmen dan bekerja sama untuk mengawasi dan mengimplementasi kebijakan secara konsisten. Pemantauan terhadap layanan kebijakan transportasi laut dilakukan untuk memastikan kesesuaian penerapan kebijakan yang diberlakukan di Pelabuhan Batu-Guluk. Pengawasan setiap harinya dilakukan yaitu tepat pada saat penumpang turun dari kapal, dan pada saat penumpang naik ke kapal. Hal ini menyebabkan rentang waktu pengawasan disejumlah titik lainnya tidaklah sama. Pada titik tertentu pengawasan jarang dilakukan petugas Batu-Guluk. Mengingat jumlah Penumpang naik dan turun di pelabuahn batu-Guluk ini sangatlah tinggi, maka perlu adanya peningkatan terhadap jadwal pengawasan dan pentertiban penumpang.

e. Penilaian

Proses penilaian yang dilakukan oleh dinas Perhubungan kepulauan Sumenep berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penilaian Dinas Perhubungan mengacu pada hasil pemantauan yang ada, artinya penilaian tidak terlepas dari pemantauan. Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk mengurangi tingginya tingkat naik dan turun penumpang terutama pada jam atau aktu kapal tiba dan kapal berangkat,

yang kemudian esensinya untuk mengurangi tingkat berkerumun atau berdesak-desakan yang ada. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Petugas pelabuhan Batu-Guluk apabila terjadi berdesak-desakan, dorongan yaitu dengan melakukan pendataan melalui membuat jalur jalan untuk penumpang agar berbaris rapi, sehingga dari kebijakan tersebut dapat penumpang dapat tertib saat naik dan turun dari kapal dan digunakan oleh unsur pemangku kepentingan untuk membuat sebuah kebijakan yang sesuai.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses analisis kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, tujuan, nilai dan kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi juga memberikan sumbangan kalifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Dari segi ekonomi, Kapal bertujuan untuk mengurangi disparitas harga yang tinggi antara wilayah. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan ini apabila ditinjau dari segi ekonomi ialah dengan berdampak kebijakan ini pada tingkat inflasi di daerah yang menjadi objek kebijakan. Dan tingkat inflasi daerah tersebut dapat diketahui dari indeks harga konsumen untuk komoditi tertentu di pasar tujuan. Kebijakan transportasi Laut dikatakan berhasil atau efektif apabila berdampak pada menurunnya tingkat keluhan penumpang.

5. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Proses Kegiatan Transportasi laut di Pelabuhan Bayu Guluk

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan pada transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan yang utama ialah dukungan yang terciptanya tenaga kerja seperti buruh yang membantu mengangkat barang bawaan penumpang dan penjual-penjual dipelabuhan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang mana penggunaan transportasi laut di pelabuhan batu-Guluk kepada kebutuhan Operasional non personalia pelabuhan serta jam keberangkatan kapal yang selalu ontime.

b. Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara peneliti dengan penumpang ada beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan pada kebutuhan transportasi laut di pelabuhan Batu-Guluk, yaitu Sarana dan Prasarana transportasi laut yang kurang memadai. Dari segi pelayanan sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting dalam pemberian layanan tersebut. Transportasi laut untuk kepulauan kangean disini dikatakan kurang memadai kebersihan di dalam transportasi lautnya tidak adanya suatu perawatan, hal ini dilihat dari kamar mandi yang kotor, musholla yang kecil, kapal laut yang kecil sedangkan kebutuhan masyarakat banyak, dan lain-lain. Hal yang seperti ini di dalam kapal membuat masyarakat kepulauan kangean merasa tidak nyaman selama perjalanan karena tidak adanya suatu perawatan untuk transportasi lautnya itu sendiri. Selain dari transportasi laut yang kurang terus juga operasi berlayarnya juga berkurang dari segi sarana dan prasarana juga kurang memadai dan tidak optimal, hal ini tidak berbanding lurus dengan teori yang mana dikatakan pemerintah dalam hal memberikan transportasi laut dengan sarana yang kurang memadai membuat masyarakat tidak puas dan cuacanya buruk sehingga sering terjadi pemberhentian pelayanan yang berkepanjangan.

E. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Pada kebutuhan Transportasi laut Pelabuhan Batu Guluk rute Kangean Kalianget Kepulauan kangean Kecamatan arjasa Kabupaten sumenep, dimana kurangnya ketertiban penumpang transportasi laut dan operasi berlayar transportasi laut dari pelabuhan kalianget ke kepulauan kangean masih dapat dirasakan oleh masyarakat kepulauan, masih belum bisa memuaskan atau mengambil hati masyarakat kepulauan kangean, selain itu juga dari segi pelayanan terhadap masyarakat kepulauan kangean masih belum maksimal dan teratur, selain itu juga pemerintah kabupaten sumenep masih belum bisa memberikan transportasi laut untuk manusia dan transportasi laut untuk barang.

1) Kurangnya transportasi laut dan kurangnya ketertiban penumpang transportasi laut untuk penumpang belum bisa dikatakan layak karena kapasitas penumpang yang banyak dan ukuran kapal yang kecil, hal ini sangat berbahaya dengan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Maka transportasi laut untuk penumpang yang disediakan harus ditambah lagi mengingat banyaknya jumlah penumpang yang butuh dengan cara memperbanyak kerjasama antar perusahaan perkapalan dan juga mencari sponsor untuk bisa memenuhi kurangnya transportasi laut untuk kepulauan Kangean.

2) Faktor pendukung dalam proses kegiatan transportasi laut di Pelabuhan Batu-Guluk yaitu terciptanya Lapangan kerja, sehingga masyarakat sekitaran pelabuhan bisa menjadi buruh untuk membantu proses bongkar muat penumpang atau barang serta kapal yang berlayar selalu ontime, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana prasarana dan cuaca yang buruk.

b. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya digunakan bagi semua pihak, yaitu:

1) Jumlah kapal yang melayani di rute Kangean-kalianget ini tidak cukup dalam mengangkut kapasitas penumpang yang cukup banyak, alangkah baiknya pemerintah perlu menambahkan armada kapal untuk mengangkut para penumpang. Sehingga penumpang tidak saling rebutan pada saat membeli tiket , karna takut tidak kebagian .

2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan penelitian terkait dengan judul penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin.Zainal,Said, 2012, Kebijakan Publik, Jakrta : PT Salemba Humanika.
- Adji.Adisasmitta,Sakti, 2011, Transportasi dan Pengembangan Wilayah, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adji.Adisasmitta,Sakti, 2011, “Perencanaan Pengembangan Transportasi” Graha Ilmu, Hal 6.
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dunn W, N, 1999. *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan DrsSamodra Wibawa, Ma Dkk. Jakarta.
- Dunn W, N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R 2008. *Understanding Publik Policy*, 12th Edition. Upper Saddle River, Nj Pearson Education.
- Dye, Thomas R 2005. *Understanding Publik Policy*, New Jersey, Perason Hal.
- Edward III, George C.1980. *Implementation Public Policy. USA*. Congresstional Quarterly Inc.
- Hayat, S.A.P, .S.i, 2018, *Kebijakan Publik*, alag : Istras Publishig.
- Jinca, M. Yamin, 2011. *Transportasi Laut Indonesia Analisis Sistem dan Studi Kasus*, Jakarta Briliian Internasional.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001, *Tentang penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan laut*.
- Lester, James P, Stewart, Josept, (2000) *Public Policy an Evolutionary Approach Wadsworth*, Stamford, USA.
- Milles,Matthew dan Hubberman, A.Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: UI Press
- Miro. F. 2005 “*Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*” Penerbit Erlangga. Moleong.Lexy J, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliana Deddy.2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnyaBandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Salim, Abbas (2006). *Management Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi.(Mixed Methodes)* Bandung Alfabeta.
- Tamin O F. 2000 “*Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*” Penerbit ITB.